

## **BAB IV**

### **SEJARAH TOPONIMI DI JAWA BARAT**

Penamaan tempat di suatu daerah atau negara dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain, dari cerita rakyat (legenda), segi historis, dan segi linguistik. Legenda merupakan cerita rakyat yang menceritakan tokoh terkenal pada masanya atau terjadinya alam, manusia, hewan, dan tumbuhan. Legenda tempat banyak dijumpai di berbagai suku bangsa di Indonesia. Di samping dilihat dari segi legenda, toponimi atau sistem penamaan daerah di Jawa Barat, dapat pula dilihat dari berbagai versi dan cara, antara lain, dari segi linguistik dan historis. Dalam bab ini disajikan sekilas toponimi di Jawa Barat berdasarkan segi historis.

Urutan penyajiannya dilakukan berdasarkan enam wilayah Privinsi Jawa barat. Keenam wilayah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Wilayah Bandung Raya mencakup Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang.
2. Wilayah Priangan Timur mencakup Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut.
3. Wilayah Purwasuka mencakup Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang.
4. Wilayah Sukaci meliputi Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, dan Cianjur.
5. Wilayah Bodebek meliputi Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi.
6. Wilayah Pantura (Pantai Utara) meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka.

## A. SEJARAH TOPONIMI BANDUNG RAYA

### 1. Toponimi Bandung



Kata “Bandung” dalam bahasa Sunda identik dengan kata *damping* dalam bahasa Indonesia yang bermakna ‘berdampingan atau berpasangan’. Dari kata *bandung* diturunkan beberapa kata lain seperti *ngabandung* yang berarti ‘berdampingan’. Kata *bandungan* bermakna: (1) dua perahu disatukan secara berdampingan; (2) menyuruh seseorang supaya memperhatikan dan menyimak. Kata *ngabandungan* bermakna ‘menyimak orang yang berbicara, membaca,

atau mengajar dengan penuh perhatian'. Kata *Bale bandung* dahulu bermakna 'tempat mendengarkan perintah raja'. Kini dijadikan nama kecamatan di wilayah Kota Bandung.

Kata bandung juga berasal dari kata *bandeng* yang berarti 'besar' atau 'luas'. Dalam bahasa Sunda *ngabandeng* berarti sebutan untuk genangan air yang luas dan tampak tenang. Ada juga yang menyatakan bahwa bandung berasal dari kata *bandung* yang berkaitan dengan peristiwa terbendungnya sungai Citarum sehingga menjadi danau besar (*talaga*) yang disebut "Danau Bandung" (*Talaga Bandung*).

Pada awalnya nama Bandung sebagai kabupaten bernama "Tatar Ukur", yang merupakan daerah Kerajaan Timbanganten dengan ibukota di Tegalluar. Kerajaan itu berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda-Pajajaran. Secara turun-temurun kerajaan Timbanganten diperintah oleh Prabu Pandaan Ukur, Dipati Agung, dan Dipati Ukur. Pada masa

pemerintahan Dipati Ukur, Tatar Ukur meliputi sembilan wilayah dengan sebutan “Ukur Sasanga”.

Sebelum berdiri Tatar Ukur, telah berdiri Sumedanglarang dengan ibukotanya Kutamaya pada tahun 1580 sebagai penerus Kerajaan Pajajaran yang runtuh tahun 1579. Wilayah kekuasaannya meliputi seluruh Priangan, kecuali wilayah Galuh.

Pada tahun 1620, ketika Sumedanglarang dipimpin oleh Raden Suriadiwangsa, anak tiri Prabu Geusan Ulun dari Ratu Harisbaya, Sumedang menjadi daerah kekuasaan Mataram. Sejak itu, status kerajaan Sumedang berubah status menjadi kabupaten. Mataram menjadikan Priangan sebagai pertahanan Mataram di sebelah barat dari serangan Banten dan kompeni di Batavia. Oleh karena itu, Sultan Agung (1613-1645) mengangkat Raden Suriadiwangsa menjadi Bupati Wedana (bupati kepala) di Priangan (1620-1624) dengan gelar pangeran Rangga Gempol Kusumahdinata atau Rangga Gempol I.

Ketika wilayah Priangan dipegang oleh Dipati Ukur Wangsanata, dia diperintahkan oleh Sultan Agung untuk menyerang Batavia bersama-sama tentara Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Bahurekso, Dipati Ukur membawa sembilan umbul. Tetapi Dipati Ukur gagal dalam penyerangan itu. Ia bersama sebagian tentaranya mengundurkan diri ke Gunung Pongporang yang terletak di Bandung Utara dekat Gunung Bukitunggul. Tindakannya dianggap oleh Mataram sebagai pemberontakan sehingga Dipati Ukur dikejar-kejar tentara Mataram. Hal ini disebabkan karena Sultan Agung telah memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Dipati Ukur hidup atau mati dengan suatu perjanjian, yakni barangsiapa yang berhasil menangkap Dipati Ukur akan diberi anugerah.

Pada waktu itu yang menjadi bupati wedana di Priangan sebagai pengganti Dipati Ukur adalah Pangeran Ranga Gede, dan diminta untuk menangkap Dipati Ukur, tetapi tidak berhasil karena dia meninggal pada waktu menjalankan perintah itu.

## 2. Toponimi Cimahi



Nama “Cimahi” merupakan kata majemuk yang berasal dari dua kata, yakni *ci* kependekan dari *cai* ‘air’ dan *mahi* ‘cukup’. Secara harfiah kata cimahi berarti ‘air yang cukup’. Hal ini sejalan dengan kebiasaan orang Sunda yang dalam memberi nama tempat disesuaikan dengan keadaan lingkungan alamnya, terutama lingkungan alam Tatar Sunda yang sangat kaya dengan airnya.

Cimahi mulai dikenal sejak tahun 1811 sebagai pos penjagaan, tepatnya di alun-alun Cimahi sekarang. Pada waktu itu, Gubernur Jenderal Herman Willem

Daendels membuat jalan dari daerah Anyer sampai daerah Panarukan. Jalan tersebut terkenal dengan sebutan Jalan Anyer-Panarukan. Kemudian tahun 1874–1893, dilaksanakan pembuatan jalan kereta api dari Bandung ke Cianjur, yang sekaligus pembuatan stasiun kereta api Cimahi. Pada tahun 1886 dibangun pula pusat pendidikan militer beserta fasilitas lainnya seperti Rumah Sakit Dustira serta rumah tahanan militer.

Pada tahun 1935, Cimahi ditetapkan sebagai sebuah kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung. Setelah kemerdekaan Indonesia, Cimahi menjadi bagian dari Kabupaten Bandung Utara. Pada tahun 1962 dibentuk Kewedanan Cimahi yang meliputi Kecamatan Cimahi, Kecamatan Padalarang, kecamatan Batujajar, dan Kecamatan Cipatat. Pada tanggal 29 Januari 1975, kedudukan Cimahi menjadi kota administratif pertama di Jawa Barat, yang kemudian pada tanggal 21 Juni 2001 berubah menjadi kota.



### 3. Toponimi Sumedang



Pada mulanya Kabupaten Sumedang adalah sebuah kerajaan di bawah kekuasaan Raja Galuh. Sumedang didirikan oleh Prabu Geusan Ulun Aji Putih atas perintah Prabu Suryadewata sebelum Keraton Galuh dipindahkan ke Pakuan Pajajaran, Bogor. Geusan Ulun yang bernama lain Angkawijaya adalah putra Pangeran Santri dari Satyasih. Masih keturunan kelima Wastukencana dari Kerajaan Galuh.

Nama Sumedang mengalami beberapa kali perubahan. Mula-mula bernama Kerajaan Tembong

Agung (Tembong artinya nampak dan Agung artinya luhur) yang dipimpin oleh Prabu Guru Aji Putih. Lalu pada masa Prabu Tajimalela diganti menjadi Himbar Buana, yang berarti menerangi alam, dan kemudian diganti lagi menjadi Sumedang Larang (Sumedang berasal dari kata *Insun Medal* atau *Insun Medangan*, yang berarti aku dilahirkan, dan *larang* berarti sesuatu yang tidak ada tandingannya). Dengan demikian, kata Sumedang dimaknai 'aku dilahirkan kembali dengan tidak ada tandingannya'.

Sumedang Larang mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Pangeran Angka Wijaya dan Prabu Geusan Ulun. Daerah kekuasaannya terhitung luas, meliputi wilayah Selatan sampai dengan Samudera Hindia, wilayah Utara sampai Laut Jawa, wilayah Barat sampai dengan Cisadane, dan wilayah Timur sampai dengan Kali Pamali.

Keadaan Sumedang mempunyai ciri sebagai kota kuno khas di Pulau Jawa, yaitu terdapat Alun-alun sebagai pusat yang dikelilingi Masjid Agung, rumah

penjara, dan kantor pemerintahan. Di tengah alun-alun terdapat Lingga, tugu peringatan yang dibangun pada tahun 1922. Tugu tersebut dibuat oleh Pangeran Siching dari Negeri Belanda yang dipersembahkan secara khusus untuk Pangeran Aria Suriaatmadja atas jasanya di dalam mengembangkan Kabupaten Sumedang. Keberadaan lingga ini diresmikan pada tanggal 22 April 1922 oleh Gubernur Jenderal Mr. D. Folk. Sampai saat ini Lingga dijadikan lambang daerah Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu, setiap tanggal 22 April diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Sumedang.

## B. SEJARAH TOPONIMI PRIANGAN TIMUR

### 1. Toponimi Ciamis



Kabupaten Ciamis pada awalnya bernama Kabupaten Galuh. Sebelumnya, nama Galuh dipakai sebagai nama kerajaan dalam kurun waktu yang lama, dari abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. "Kerajaan Galuh muncul pada abad ke-7 Masehi, didirikan oleh Wretikandayun,". Kerajaan Galuh ini terus eksis sampai akhir abad ke-16 dan mencapai puncak kejayaannya pada masa Prabu Niskala Wastu Kancana yang pusat kerajaannya di Kawali.

Sebagai kerajaan yang besar yang wilayah kekuasaannya pernah mencakup beberapa wilayah Jawa bagian tengah, Kerajaan Galuh meninggalkan ajaran atau falsafah yang sekarang disebut falsafah kagaluhan. "Falsafah kagaluhan di antaranya berasal dari prasasti Kawali I di Astana Gede, yakni *pakena gawe rahayu pakeun heubeul jaya di buana*, yang artinya harus membiasakan berbuat kebajikan agar lama jaya di dunia".

Ajaran kagaluhan lainnya diambil dari pandangan atau sikap Prabu Haurkuning mengenai kehidupan, antara lain, bahwa "kehidupan harus berlandaskan pada silihasih dan budi pekerti yang baik. Manusia harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk; mana yang benar dan mana yang salah. Prabu yang baik dan yang membuat harum seseorang tiada lain adalah "budi yang luhur".

Pengaruh kerajaan Galuh sampai di Jawa Timur. Di Surabaya, tepatnya di Kecamatan Bubutan, terdapat nama Kampung Galuhan. Pada tahun 1970-an, orang-

orang tua di sana mengaku dirinya sebagai keturunan Galuh. Nama Galuhan sendiri berasal dari Hujung Galuh atau Ujung Galuh. Nama ini bisa diartikan batas Kerajaan Galuh.

Sejak tahun 1595, Kabupaten Galuh menjadi daerah *patalukan* (vassal) Mataram dan wilayahnya hanya sebagai kabupaten. Demikian juga, pada waktu dikuasai oleh pemerintahan VOC dari tahun 1705 sampai akhir abad ke-18, Ciamis pamornya redup. Namun, pada saat dipimpin oleh bupati R.A.A. Kusumadiningrat (1839-1886), pamor Kabupaten Galuh sangat tinggi karena menjadi kabupaten yang disegani masa itu. Pada waktu itu, ibukota Kabupaten Ciamis berada di Imbanagara.

Penyebutan Galuh menjadi Ciamis dilatarbelakangi oleh peristiwa banjir darah pada tahun 1739 di daerah Ciancang sehingga terkenal dengan sebutan tragedi Ciancang atau Bedah Ciancang. Waktu itu, daerah Ciancang diserbu ratusan penjarah yang berasal dari Banyumas, namun pasukan Ciancang

yang dibantu oleh pasukan dari Sukapura, Limbangan, Parakan Muncang, dan Sumedang, dapat menumpasnya. Para penjarah banyak yang terbunuh. Air sungai waktu itu berubah merah darah dan tercium bau “anyir”, yang dalam bahasa Jawa-Cirebon disebut *amis*. Sejak itu, orang ramai-ramai menyebut cai amis, kemudian ciamis.

Penamaan Kabupaten Ciamis sebagai nama yang menggantikan nama Kabupaten Galuh terjadi sejak dikeluarkan dari Wilayah Keresidenan Cirebon dan dimasukkan ke Wilayah Keresidenan Priangan pada tahun 1915. Sejak itu, nama Galuh perlahan tapi pasti terpusus, terutama dalam administrasi pemerintahan kolonial Belanda. Akibatnya, nama Galuh hanya dijumpai dan dipakai pada hal-hal yang berkaitan dengan budaya dan sejarah.

## 2. Toponimi Banjar



Kata “banjar” dalam bahasa Sunda bermakna ‘tempat berdiam’. Hal ini muncul dalam ungkapan bahasa Sunda *Lembur matuh, banjar karang pamidangan*, yakni tempat tinggal atau tempat berdiam diri.

Nama banjar biasanya disebut juga **Banjar Patroman** (dari nama asal "Banjar Pataruman"). Penamaan ini dilakukan untuk membedakannya dengan Banjarnegara yang berada di Jawa Tengah. Banjar Pataruman pada awalnya adalah sebuah kerajaan. Mungkin dahulunya, Banjar sebagai tempat



yang memiliki banyak pohon Kitarum atau tarum karena “pataruman” berarti ‘tempat tarum’ yang berderet atau berbanjar.

Kini Banjar menjadi sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, sebagai pemekaran dari Kabupaten Ciamis. Banjar merupakan kota yang menjadi pintu gerbang utama jalur lintas selatan Jawa Barat. Kota Banjar terus berkembang dengan beberapa kedudukan, yakni:

- 1) Banjar sebagai ibukota kecamatan, dari tahun 1937—1940;
- 2) Banjar sebagai ibukota kewadanaan, dari tahun 1941 sampai dengan 1 Maret 1992;
- 3) Banjar sebagai Kota Administratif dari tahun 1992 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2003; dan
- 4) Status Kota Administratif Banjar menjadi kota ditetapkan sejak tanggal 21 Pebruari 2003.

### 3. Toponimi Garut



Sejarah Kabupaten Garut berawal dari pembubaran Kabupaten Limbangan pada tahun 1811 oleh Daendles dengan alasan produksi kopi dari daerah Limbangan menurun hingga titik paling rendah nol dan bupatinya menolak perintah menanam nila (indigo). Pada tanggal 16 Pebruari 1813, Letnan Gubernur di Indonesia yang pada waktu itu dijabat oleh Raffles, telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pembentukan kembali Kabupaten Limbangan yang beribu kota di Suci.

Untuk sebuah Kota Kabupaten, keberadaan Suci dinilai tidak memenuhi persyaratan sebab daerah

tersebut kawasannya cukup sempit. Berkaitan dengan hal ini, Bupati Limbangan Adipati Adiwijaya (1813-1831) membentuk panitia untuk mencari tempat yang cocok bagi Ibu Kota Kabupaten.

Pada awalnya, panitia menemukan Cumurah, sekitar 3 Km sebelah barat Suci (Saat ini kampung tersebut dikenal dengan nama Kampung Pidayeuheun). Akan tetapi, di tempat tersebut air bersih sulit diperoleh sehingga tidak tepat menjadi Ibu Kota. Selanjutnya, panitia mencari lokasi ke arah Barat Suci, sekitar 5 Km dan mendapatkan tempat yang cocok untuk dijadikan Ibu Kota. Selain tanahnya subur, tempat tersebut memiliki mata air yang mengalir ke Sungai Cimanuk serta pemandangannya indah yang dikelilingi beberapa gunung, seperti Gunung Cikuray, Gunung Papandayan, Gunung Guntur, Gunung Galunggung, Gunung Talaga Bodas dan Gunung Karacak.

Saat ditemukan mata air berupa telaga kecil yang tertutup semak belukar berduri (*Marantha*), seorang panitia "kakarut" atau tergores tangannya

sampai berdarah. Dalam rombongan panitia, turut pula seorang Eropa yang ikut membenahi atau "ngabaladah" tempat tersebut. Begitu melihat tangan salah seorang panitia tersebut berdarah, langsung bertanya, "Mengapa berdarah?" Orang yang tergores menjawab, tangannya *kakarut*. Orang Eropa tersebut menirukan kata kakarut dengan lidah yang tidak fasih sehingga sebutannya menjadi "gagarut".

Sejak saat itu, para pekerja dalam rombongan panitia pembukaan kabupaten, menamai tanaman berdurinya tersebut dengan sebutan "Ki Garut" dan telaganya dinamai "Cigarut". (Lokasi telaga ini sekarang ditempati oleh bangunan SLTP 1, SLTP 2, dan SLTP 4 Garut).

Dengan ditemukannya Cigarut, daerah sekitar itu dikenal dengan nama Garut. Cetusan nama Garut tersebut direstui oleh Bupati Kabupaten Limbangan, yakni Adipati Adiwijaya, untuk dijadikan Ibu Kota Kabupaten Limbangan.

#### 4. Toponimi Tasikmalaya



Cikal bakal Kabupaten Tasikmalaya berasal dari Umbul Surakarta dengan ibukotanya Dayeuh Tengah. Daerah ini sekarang menjadi nama sebuah desa yang termasuk ke dalam Kecamatan Salopa, kira-kira 5 km sebelah Timur Kecamatan Sukaraja. Pada waktu itu, penguasa Negara Surakarta itu bernama Sareupeun Cibuniagung. Ia memiliki seorang puteri tunggal yang bernama Nyai Punyai Agung (Ageng). Nyai Punyai Agung menikah dengan Entol Wiraha yang menggantikannya menjadi penguasa Surakarta. Dari perkawinan tersebut lahirlah Wirawangsa, yang berkuasa di Surakarta menggantikan ayahnya.

Sewaktu Wirawangsa berkuasa, statusnya menjadi umbul. umbul Surakarta berada di wilayah Priangan yang dipegang oleh Dipati Ukur Wangsanata.

Ketika Dipati Ukur diperintah Sultan Agung untuk menyerang Batavia bersama-sama tentara Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Bahurekso, Dipati Ukur membawa sembilan umbul, di antaranya, Umbul Surakarta, Wirawangsa. Tetapi Dipati Ukur gagal dalam penyerangan itu. Ia bersama sebagian tentaranya mengundurkan diri ke Gunung Pongporang yang terletak di Bandung Utara dekat Gunung Bukitunggul. Tindakannya dianggap oleh Mataram sebagai pemberontakan sehingga Dipati Ukur dikejar-kejar tentara Mataram.

Karena tindakan Dipati Ukur itu dianggap membahayakan, Sultan Agung memerintahkan untuk menangkapnya hidup atau mati dengan suatu perjanjian, bahwa barangsiapa yang berhasil menangkap Dipati Ukur akan diberi anugerah. Pada waktu itu yang menjadi bupati wedana di Priangan

sebagai pengganti Dipati Ukur adalah Pangeran Rangga Gede, dan diminta untuk menangkap Dipati Ukur, tetapi tidak berhasil karena dia meninggal pada waktu menjalankan perintah itu.

Dipati Ukur tertangkap di daerah Cengkareng sekarang oleh tiga umbul Priangan Timur, kemudian dibawa ke Mataram, dan oleh Sultan Agung dijatuhi hukuman mati. Ketiga umbul yang ikut menangkap Dipati Ukur adalah Umbul Surakarta Ki Wirawangsa, Umbul Cihaurbeuti Ki Astamanggala, dan Umbul Sindangkasih Ki Somahita. Ketiga umbul tersebut juga menangkap delapan umbul lainnya yang *biluk* (setia) kepada Dipati Ukur. Atas jasanya, ketiga umbul tersebut diangkat menjadi mantri agung di tempatnya masing-masing. Ki Wirawangsa diangkat menjadi mantri agung Sukapura dengan gelar Tumenggung Wiradadaha, Ki Astamanggala diangkat menjadi mantri agung Bandung dengan gelar Tumenggung Wiraangun-angun, dan Ki Somahita menjadi mantri agung Parakanmuncang digelari Tumenggung Tanubaya.

Setelah diangkat menjadi mantri agung Sukapura, kota kabupaten pun dipindahkan dari Dayeuh Tengah di Sukakarta ke Leuwi Loa (wilayah desa Sukapura) daerah Sukaraja sekarang, terletak di tepi sungai Ciwulan. Oleh karena perpindahan ibukota pindah ke Sukapura, nama kabupaten pun disebut Kabupaten Sukapura. Perubahan nama Leuwi Loa menjadi Sukapura berdasarkan alasan karena di Leuwi Loa didirikan *pura* yang bermakna 'kraton' dan *suka* bermakna 'asal' atau 'tiang'. Jadi, sukapura bermakna *jejernya karaton* karena di tempat inilah berdirinya bupati Sukapura yang pertama.

Raden Tumenggung Wiradadaha (Wiradadaha I) yang berjasa mendirikan Kabupaten Sukapura wafat, dan dimakamkan di Pasir Baganjing sehingga terkenal dengan sebutan Dalem Baganjing.

Pengganti Wiradadaha I adalah putranya yang ketiga yang bernama Raden Jayamanggala dengan gelar raden Tumenggung Wiradadaha II. Namun, Wiradadaha II tidak lama berkuasa karena pada tahun



pengangkatannya sebagai tumenggung meninggal dunia karena dihukum mati. Keluarganya hanya mendapatkan tambela yang berisi mayat Wiradadaha II. Oleh karenanya, Wiradadaha II terkenal dengan julukan *Dalem Tambela*.

Setelah meninggal dunia, Raden Wiradadaha II digantikan oleh adiknya yang bernama Raden Anggadipa I, putra keempat Wiradadaha I. Setelah menjadi bupati, Raden Anggadipa bergelar Raden Tumenggung Wiradadaha III. Dia terkenal sebagai bupati Sukapura terkaya dan memiliki anak sebanyak 62 orang hingga ia dikenal dengan *Dalem Sawidak*.

Setelah meninggal dunia, Wiradadaha III digantikan oleh anaknya Raden Subangmanggala dengan gelar Raden Tumenggung Wiradadaha IV. Raden Wiradadaha IV meninggal dunia dan dimakamkan di Pamijahan dekat gurunya Syeh Abdul Muhyi dan dikenal dengan sebutan *Dalem Pamijahan*.

Raden Wiradadaha IV digantikan oleh anak angkatnya yang bernama Raden Secapati. Raden

Secapati adalah cucu Dalem Tamela. Setelah diangkat menjadi bupati, dia menggunakan nama Raden Tumenggung Wiradadaha V, tetapi lebih dikenal dengan sebutan *Dalem Tumenggung Secapati*.

Setelah wafat, Wiradadaha V digantikan oleh putranya yang bernama raden Jayangadireja dengan gelar Raden Tumenggung Wiradadaha VI. Ia menikahi putri bupati Parakanmuncang. Karena sering bertolak belakang dengan pemerintah Kolonial, Wiradadaha VI mengundurkan diri, dan digantikan oleh anaknya Raden Jayamanggala II dengan gelar Raden Tumenggung Wiradadaha VII atau Raden Adipati Wiratanubaya. Karena dimakamkan di Pasirtando, beliau terkenal dengan sebutan *Dalem Pasirtando*.

Pengganti Wiradadaha VII adalah putranya yang kelima Raden demang Anggadipa dengan gelar Raden Tumenggung Wiradadaha VIII. Ia terkenal dengan sebutan *Dalem Sepuh*. Ketika ia menolak menanam nila, Wiraradaha VIII dipecat, Sukapura dialihkan ke Kabupaten Limbangan.

Kabupaten Sukapura didirikan kembali dengan bupati-nya turunan bupati Sumedang, yakni raden Tumenggung Surialaga, yang lebih dikenal dengan sebutan *Dalem Talun*. Dua tahun kemudian, Dalem Talun mengundurkan diri, kabupaten Sukapura diserahkan kembali ke bupati Limbangan. Namun, selanjutnya dikembalikan lagi ke Wiradadaha VIII dari bupati Limbangan, kecuali daerah Suci dan Panembong.

Pada masa kekuasaan Widadaha VIII, Sukapura memiliki wilayah yang sangat luas. Wilayahnya meliputi sebagian dari Sumedang: Malangbong, Ciawi, Indihiang, Singaparna, dan Tasikmalaya; sebagian dari Galuh: Pasirpanjang, Banjar, Kawasen, Parigi, Cijulang, Mandala, Cikembulan, dan Kalipucang. Wilayah Sukapura asalnya hanya distrik Mangunreja, Panyeredan, Taraju, Sukaraja, Parung, Karang, Cikajang, batuwangi, Nagara (Pameungpeuk), tanah yang luas ini disebut Tanah Galunggung.

Karena terlalu luas, Kabupaten Sukapura dibagi tiga bagian, yakni afdeeling Sukapura Kolot, Sukapura, dan Tasikmalaya. *Sukapura Kolot* dengan ibukota Mangunreja meliputi dua afdeeling, yakni afdeeling Mangunreja (Panyeredan, Karang, Sukaraja, Taraju, Parung), dan afdeeling Cikajang (Batuwangi, Kandangwesi, Nagara, dan Selacau). *Sukapura* meliputi dua afdeeling, yakni afdeeling Manonjaya (Pasirpanjang, Banjar, Kawasen) dan afdeeling Parigi (Parigi, Cijulang, Mandala, Cikembulan, dan Kalipucang). Afdeeling Tasikmalaya Tasikmalaya mencakup Ciawi, Indihiang, dan Malangbong.

Setelah memiliki wilayah yang luas, ibukota Sukapura di Sukaraja dipindahkan ke Manonjaya. Pada waktu itu, Wiradadaha VIII wafat dan dimakamkan di Tanjung Malaya. Kemudian digantikan oleh adiknya R.T. Danuningrat dengan gelar R.T. Wiradadaha IX, yang membangun Kota Manonjaya. Setelah wafat, Danuningrat digantikan Raden Rangga Wiradimanggala

dengan gelar R.T. Wiratanubaya sebagai bupati Sukapura X.

Setelah wafat, R.T. Wiratanubaya lebih dikenal dengan sebutan *Dalem Sumeren*. Karena tidak punya anak, Wiratanubaya digantikan oleh Raden Rangga Tanuwangsa dengan gelar raden Wiraadegdaha (bupati Sukapura XI). Kemudian digelari Adipati sehingga namanya menjadi Raden Adipati Wiraadegdaha. Karena diturunkan dari jabatannya, R.A. Wiraadegdaha pindah ke Bogor dan terkenal dengan sebutan *Dalem Bogor*. Jabatannya digantikan adiknya Raden demang danukusumah, patih Manonjaya. Setelah menjadi bupati, namanya menjadi R.T. Wirahadiningrat, bupati Sukapura XII. Dia pernah diberi gelar adipati, mendapat *payung kuning*, dan *Bintang Oranye Nassau*, sehingga mendapat sebutan *Dalem Bintang*.

Dalem Bintang wafat. Penggantinya adalah Raden Rangga Wiratanuwangsa, putrana Dalem Bogor. Setelah menjadi bupati, diganti namanya menjadi R.T. Wiraadiningrat, bupati Sukapura XIII. Pada masa ini,

ibukota Sukapura dipindahkan dari manonjaya ke Tasikmalaya. Dia bupati pertama yang mendapat gelar *aria*, sehingga terkenal dengan sebutan *Dalem Aria*.

Setelah wilayah afdeeling Mangunreja menjadi bawahan Sukapura, dan afdeeling Cikajang menjadi bawahan Kabupaten Limbangan, sedangkan Distrik Malangbong dibagi dua, yakni sebagian bawahan Limbangan dan sebagian bawahan Sumedang. Sejak itulah, Sukapura berubah nama menjadi Tasikmalaya.

Pada awalnya daerah yang disebut Sukapura itu bernama Tawang atau Galunggung. Sering juga disebut Tawang-Galunggung. Tawang berarti 'sawah' atau 'tempat yang luas terbuka'. Penyebutan Tasikmalaya muncul setelah Gunung Galunggung meletus sehingga wilayah Sukapura berubah menjadi *Tasik* 'danau, laut' dan *malaya* dari *(ma)layah* bermakna 'ngalayah (bertebaran)' atau 'deretan pegunungan di pantai Malabar (India)'. Tasikmalaya mengandung arti 'keusik ngalayah', maksudnya banyak pasir di mana-mana.

## C. SEJARAH TOPONIMI PURWASUKA

### 1. Toponimi Karawang



Pada zaman Kerajaan Padjadjaran yang dipimpin oleh Sri Baduga Maharaja, Karawang merupakan salah satu kota dari Pajajaran yang merupakan kota Pelabuhan di tepi Sungai Citarum. Penyebutan Karawang berasal dari kata 'Karawaan' yang mengandung arti bahwa daerah ini banyak terdapat rawa. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya

daerah yang menggunakan kata rawa di depannya seperti, *Rawa Gabus*, *Rawa Monyet*, dan *Rawa Merta*.

Penduduk Karawang semula beragama Hindu. Semenjak takluk dan berada di bawah Kesultanan Banten, masyarakat Karawang berpindah ke Agama Islam. Hasil terjadi setelah datang Syekh Hasanudin bin Yusuf Idofi, yang terkenal dengan sebutan "Syekh Quro", yang mengajarkan mengaji dan agama Islam.

Karawang menjadi daerah berpemerintahan sendiri, direbut oleh Kesultanan Mataram, di bawah pimpinan Wiraperbangsa dari Sumedang Larang tahun 1632. Kesuksesannya menempatkannya sebagai wedana pertama dengan gelar Adipati Kertabumi III. Semenjak masa ini, sistem irigasi mulai dikembangkan di Karawang dan perlahan-lahan daerah ini menjadi daerah pusat penghasil beras utama di Pulau Jawa hingga akhir abad ke-20.

Karawang menjadi kabupaten dengan bupati pertama Raden Singaperbangsa bergelar Kertabumi IV yang dilantik 14 September 1633. Tanggal ini menjadi



hari jadi Kabupaten Karawang. Selanjutnya, bupatinya berturut-turut adalah R. Anom Wirasuta (1677-1721), R. Jayanegara (gelar R.A Panatayuda II (1721-1731)), R. Martanegara (R. Singanagara dengan gelar R. A Panatayuda III (1731-1752)), R. Mohamad Soleh (gelar R. A Panatayuda IV (1752-1786)). Pada rentang ini terjadi peralihan penguasa dari Mataram kepada VOC sampai datangnya kekuasaan Inggris ( 1811-1816).

Kabupaten Karawang dihapuskan dan baru dihidupkan kembali sekitar tahun 1820 dan Bupati pertamanya R.A.A. Surianata. Sejarah kedudukan Ibukota Kabupaten Karawang dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Kabupaten Karawang dengan Ibukotanya di Karawang selama 166 tahun, yakni dari tahun 1653-1819;
2. Kabupaten Karawang dengan Ibukotanya di Wanayasa selama 10 tahun, yakni dari sekitar tahun 1820-1830; dan

3. Kabupaten Karawang dengan Ibukotanya di Purwakarta selama 119 tahun, yakni dari tahun 1830-1949.

Melalui keputusan Wali Negara Pasundan Nomor 12 pada tanggal 29 Januari 1949, Kabupaten Karawang dipecah menjadi 2, yaitu Karawang Barat dengan Ibu Kota Karawang dan Karawang Timur menjadi Kabupaten Purwakarta dengan Ibukota di Subang.

Dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang secara resmi dinyatakan sebagai Kabupaten yang berdiri sendiri dengan Ibukota di Karawang

## 2. Toponimi Purwakarta



Keberadaan Purwakarta tidak terlepas dari sejarah perjuangan melawan pasukan VOC. Sekitar awal abad ke-17, Sultan Mataram mengirimkan pasukan tentara yang dipimpin oleh Bupati Surabaya ke Jawa Barat. Salah satu tujuannya adalah untuk menundukkan kekuasaan Sultan Banten. Tetapi dalam perjalanannya bentrok dengan pasukan VOC sehingga terpaksa mengundurkan diri.

Setelah kejadian itu, dikirimkan kembali ekspedisi kedua dari Pasukan Mataram di bawah pimpinan Dipati Ukur, lagi-lagi mengalami nasib yang

sama pula. Hal ini disebabkan pasukan Dipati Ukur berangkat sendirian tidak menunggu datangnya bantuan dari Mataram.

Untuk menghambat perluasan wilayah kekuasaan kompeni (VOC), Sultan Mataram mengutus Panembahan Galuh (Ciamis) yang bernama R.A.A. Wirasuta dengan gelar Adipati Panatayuda atau Adipati Kertabumi III untuk menduduki Rangkas Sumedang (Sebelah Timur Citarum). Juga mendirikan benteng pertahanan di Tanjungpura, Adiarsa, Parakansapi, dan Kuta Tandingan. Setelah mendirikan benteng tersebut, Adipati Kertabumi III kemudian kembali ke Galuh dan wafat. Nama Rangkas Sumedang itu sendiri berubah menjadi Karawang karena kondisi daerahnya berawarawa (Sunda : "*Karawaan*").

Sultan Agung Mataram kemudian mengangkat putera Adipati Kertabumi III, yakni Adipati Kertabumi IV menjadi Dalem (Bupati) di Karawang, pada Tahun 1656. Adipati Kertabumi IV ini juga dikenal sebagai

Panembahan Singaperbangsa atau Eyang Manggung, dengan ibu kota di Udug-udug.

Pada masa pemerintahan R. Anom Wirasuta, putera Panembahan Singaperbangsa yang bergelar R.A.A. Panatayuda I antara Tahun 1679 dan 1721 ibu kota Karawang dari Udug-udug pindah ke Karawang, dengan daerah kekuasaan meliputi wilayah antara Cihoe (Cibarusah) dan Cipunagara. Pemerintahan Kabupaten Karawang berakhir sekitar tahun 1811-1816 sebagai akibat dari peralihan penguasaan Hindia-Belanda dari Pemerintahan Belanda kepada Pemerintahan Inggris.

Antara tahun 1819-1826 Pemerintahan Belanda melepaskan diri dari Pemerintahan Inggris yang ditandai dengan upaya pengembalian kewenangan dari para Bupati kepada Gubernur Jendral Van Der Capellen. Dengan demikian Kabupaten Karawang dihidupkan kembali sekitar tahun 1820, meliputi wilayah tanah yang terletak di sebelah Timur sungai Citarum/Cibeet dan sebelah Barat sungai Cipunagara.

Dalam hal ini, kecuali Onder Distrik Gandasoli, sekarang Kecamatan Plered pada waktu itu termasuk Kabupaten Bandung. Sebagai Bupati I Kabupaten Karawang yang dihidupkan kembali diangkat R.A.A. Surianata dari Bogor dengan gelar Dalem Santri yang kemudian memilih ibukota kabupaten di Wanayasa.

Pada tahun 1830, yakni masa pemerintahan Bupati R.A. Suriawinata, yang terkenal dengan sebutan Dalem Sholawat, ibukota Purwakarta dipindahkan dari Wanayasa ke Sindangkasih yang diresmikan berdasarkan besluit (surat keputusan) pemerintah kolonial Nomor 2 tanggal 20 Juli 1831.

Pembangunan dimulai antara lain dengan pengurugan rawa-rawa untuk pembuatan Situ Buleud, Pembuatan Gedung Karesidenan, Pendopo, Masjid Agung, Tangsi Tentara di Ceplak, termasuk membuat Solokan Gede, Sawah Lega dan Situ Kamojing. Pembangunan terus berlanjut sampai pemerintahan bupati berikutnya.

Sampai tahun 1949, Purwakarta berstatus sebagai ibukota Karawang. Namun, berdasarkan Surat Keputusan Wali Negeri Pasundan Nomor 12, tertanggal 29 Januari 1949 dengan, Kabupaten Karawang dipecah dua bagian, yakni Karawang Bagian Barat menjadi Kabupaten Karawang dan Karawang Bagian Timur menjadi Kabupaten Purwakarta dengan ibukotanya Subang. Berdasarkan Undang-undang nomor 14 tahun 1950, selanjutnya diatur penetapan Kabupaten Purwakarta, dengan ibu kota Purwakarta, yang meliputi Kewedanaan Subang, Sagalaherang, Pamanukan, Ciasem dan Purwakarta

Berdasarkan Undang-undang No. 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang SK Wali Negeri Pasundan diubah dan ditetapkan bahwa Kabuapten Purwakarta hanya memiliki 4 kecamatan, yaitu Purwakarta, Plered, Wanayasa, dan Campaka.

### 3. Toponimi Subang



Nama “subang” memiliki kesamaan dengan nama tokoh dalam cerita pantun, Nyai Subanglarang, yakni adik perempuan Walangsungsang. Subang pada mulanya merupakan daerah perkebunan yang dimiliki oleh Peter Willem Hofland. Ia merupakan pemilik dari wilayah perkebunan yang sangat luas. Untuk melakukan transportasi digunakan lori, yang disebut dogong. Di seluruh perkebunan dipasang jalur rel kereta api. Lori ini, disatu titik (Wesel), mengalami persimpangan yang mengarahkannya ke daerah Sumurbarang dan Manyingsal. Pada tahun 1886, nama perusahaan perkebunan yang bernama



Perkebunan P & T (Pamanukan & Tjiasem) berganti nama NV. Maatschappy Ter Exploitatie der Pamanukan en Tjiasem Landen.

Sebagai wilayah sebelah timur Kabupaten Karawang, Subang menjadi ibukota Karawang Bagian Timur atau ibukota Kabupaten Purwakarta. Tepatnya pada tanggal 2 Januari 1949 dengan SK Wali Negeri Pasundan Nomor 12.

Di dalam perkembangan selanjutnya, karena wilayah Subang sebagai bagian dari Kabupaten Purwakarta dirasakan terlalu luas, maka terjadilah pemekaran daerah. Subang menjadi Kabupaten tersendiri sebagai pemekaran dari Kabupaten Purwakarta berdasarkan Undang-undang No. 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.

Pada tahun 1950 Subang menjadi sebuah perkebunan karet yang luas. Pusat kegiatannya berada di bawah perusahaan "The Anglo Indonesian Plantation LTD".

## D. SEJARAH TOPONIMI SUKACI

### 1. Toponimi Sukabumi



Pada masa pemerintahan Bupati Cianjur VI, yaitu Rd. Noh (Wiratanoedatar VI), tepatnya pada tahun 1776, dalam wilayah Kabupaten Cianjur diangkat seorang Patih yang membawahi Distrik Gunungparang, Distrik Cimahi, Distrik Ciheulang, Distrik Cicurug, Distrik Jampangtengah, dan Distrik Jampangkulon. Pusat Pemerintahannya terletak di Cikole. Dipilihnya Cikole

sebagai pusat kepatihan sehubungan lokasi itu sangat strategis bagi komunikasi antara Priangan dan Batavia (Jakarta).

Selain itu, Cikole merupakan tempat yang nyaman bagi peristirahatan serta memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi, khususnya di bidang perkebunan. Oleh karena itu, atas usul para Pimpinan Bumi Putera, Andries de Wilde yang menjabat administratur pada masa Gubernur Jenderal Sir Thomas Raffles, pada tanggal 8 Januari 1815 mengubah nama Cikole menjadi Sukabumi berasal dari bahasa Sunda, yaitu Suka dan bumi.

Menurut keterangan, mengingat udaranya yang sejuk dan nyaman, mereka yang datang ke daerah ini tidak ingin pindah lagi, karena suka atau senang bumen-bumen atau bertempat tinggal di daerah ini. Pada saat itu, daerah Sukabumi dikenal sebagai tempat peristirahatan bagi para petinggi perkebunan Belanda. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila Belanda mendirikan pusat perkantoran di Sukabumi untuk

mengurus perkebunan yang tersebar di beberapa tempat. Tempat peristirahatan yang dibangun dalam waktu singkat menjadi tempat favorit bagi para petinggi perusahaan perkebunan Belanda, kemudian mengubah tempat peristirahatan itu menjadi hotel.

Sejak tahun 1865, daerah Sukabumi semakin berkembang dengan pesat, sehingga pada tahun 1914 tercatat penduduk yang berasal dari Eropa berjumlah 600 orang dan penduduk asli yang bersuku Sunda dan suku bangsa lainnya sekitar 14.400 orang. Pada tahun itu pula, pemerintah Hindia Belanda menjadikan Sukabumi sebagai *Burgerlijk Bestuur* dengan status *Gemeente* dengan alasan bahwa di kota ini banyak berdiam orang-orang Belanda dan Eropa. Mereka kebanyakan merupakan para pemilik perkebunan-perkebunan yang berada di daerah Kabupaten Sukabumi bagian selatan, yang harus mendapatkan pengurusan dan pelayanan yang istimewa.

Sejak ditetapkannya Sukabumi menjadi Daerah Otonom pada bulan Mei 1926, maka resmi diangkat

“Burgemeester” yaitu Mr. G.F. Rambonnet. Pada masa inilah dibangun Stasiun Kereta Api, Masjid Agung, gereja Kristen Pantekosta; Katolik; Bethel; HKBP Pasundan, pembangkit listrik Ubrug; *centrale* (Gardu Induk) Cipoho, Sekolah Polisi Gubernur yang berdekatan dengan lembaga pendidikan Islam tradisional Gunung Puyuh.

Setelah Mr. G.F. Rambonnet memerintah, terdapat tiga “Burgemeester” sebagai penggantinya, yaitu Mr. W.M. Ouwekerk, Mr. A.L.A. van Unen, dan Mr. W.J.Ph. van Waning.

## 2. Toponimi Cianjur



Pada pertengahan abad ke-17 ada perpindahan rakyat ke Sagara Herang yang dipimpin oleh Aria wangsa Goparana. Dia adalah keturunan Sunan Talaga, yang terpaksa meninggalkan Talaga karena masuk Islam, sedangkan para Sunan Talaga waktu itu masih kuat memeluk Hindu. Dia mendirikan Nagari Sagara Herang dan menyebarkan Agama Islam ke daerah sekitarnya. Bersama dengan Pangeran Girilaya, dia mendirikan pesantren.

Tahun 1614 merupakan saat bersejarah bagi Cianjur. Sejak itu daerah Gunung Gede dan Gunung Pangrango ada di bawah Kesultanan Mataram.

Tersebutlah sekitar tanggal 12 Juli 1677, Raden Wiratanu, putra R.A. Wangsa Goparana Dalem Sagara Herang mengemban tugas untuk mempertahankan daerah Cimapag dari kekuasaan kolonial Belanda yang mulai menanamkan kekuasaan di tanah Nusantara. Upaya Wiratanu untuk mempertahankan daerah ini juga erat kaitannya dengan desakan Belanda atau VOC saat itu yang ingin mencoba menjalin kerjasama dengan Sultan Mataram Amangkurat I.

Namun sikap patriotik Amangkurat I yang tidak mau bekerjasama dengan Hindia Belanda (VOC), mengakibatkan ia harus rela meninggalkan keraton pada tanggal 12 Juli 1677. Kejadian ini memberi arti bahwa setelah itu Mataram terlepas dari wilayah kekuasaannya. Setelah berkuasa lebih kurang 57 tahun (1620-1677), Mataram kemudian menyerahkan Priangan kepada VOC.

Pada awal berada di bawah kekuasaan VOC, Cianjur termasuk dalam wilayah politik yang bernama *Bataviasche Ommelanden*. Bersama-sama dengan

wilayah lainnya seperti Tangerang dan Grending, Kampung Baru (Bogor), Jampang, Cibalagung, Pamanukan, Pagaden, Timbanganten, Batulayang, dan Parakanmuncang.

Pada waktu itu muncullah *Padaleman Cianjur* dengan pusat pemerintahan berada di Cikundul-Pamoyanan, yang dipimpin oleh Aria Wira Tanu. Wira Tanu (dalem Cikundul) diangkat menjadi kepala padaleman wilayah lainnya seperti Nalamerta (dalem Cipamingkis), Nyilih Nagara (dalem Cimapag), Wangsa Kusumah (dalem Cikalong), Nata Manggala (Dalem Cibalagung), dan Wastu Nagara (Dalem Cihea). Sebagai pimpinan padaleman, Wira Tanu digelar Aria menjadi Aria Wira Tanu.

Sepeninggal ayahnya, Wira Tanu I, diangkatlah Raden Aria Wiramanggala menjadi bupati Cianjur, dengan gelar Aria Wira Tanu II (1691-1707). Kekuasaannya berlangsung selama 16 tahun. Selanjutnya, digantikan oleh anaknya, yakni Aria Wira Tanu III.



Pada waktu kekuasaan Aria Wira Tanu III (1707-1726), ibukota kabupaten Cianjur dipindahkan dari Pamoyanan ke Kampung Cianjur. Aria Wira Tanu III mengajukan diri menjadi *Pangeran Dipati Amangkurat Di Datar*. Sejak itulah kata *Datar* digunakan sehingga muncul nama Aria Wira Tanu Datar.

Wilayah Cianjur terus mengalami perluasan daerah. Wilayahnya meliputi sebagian Kampung Baru (Bogor), Cibalagung, dan Cikalong. Hal ini terjadi terutama ketika kekuasaan Raden Sabarudin yang menjadi bupati Cianjur dengan gelar Aria Wira Tanu Datar IV (1727-1761).

Sepeninggal Raden Aria Wira Tanu Datar IV, maka diangkatlah puteranya yang tertua, yakni Raden Muhyidin, dengan gelar Raden Adipati Wira Tanu Datar V. Selanjutnya, Raden Adipati Wira Tanu Datar V digantikan oleh putera sulungnya yang bernama Raden Noh alias Raden Wiranagara dengan gelar Raden Adipati Wira Tanu Datar VI.

## E. SEJARAH TOPONIMI BODEBEK

### 1. Toponimi Bogor



Pada masa ibukota kerajaan Pajajaran dibumihanguskan pasukan Banten pada tahun 1579, disebutkan bahwa seluruh ibukota kerajaan dihancurluluhkan dan penduduknya banyak yang dibunuh atau diusir dari kerajaan. Ada sekitar 40 orang pengisi keraton dan penjaga keraton bersama rajanya dapat meloloskan diri ke wilayah sebelah selatan Bogor, yakni ke daerah Kanekes atau Baduyu sekarang. Konon warga kerajaan yang meloloskan diri itu menjadi suku Baduy atau Kanekes, yang bertempat

tinggal di Kapuunan Cibeo, Kapuunan Cikeusik, dan Kapuunan Cikertawana.

Setelah satu abad hilang dari percaturan sejarah, kota yang pernah berpenghuni 50.000 jiwa itu menggeliat kembali menunjukkan ciri-ciri kehidupan. Reruntuhan kehidupannya mulai tumbuh kembali berkat ekspedisi yang berturut-turut dilakukan oleh Scipio pada tahun 1687, Adolf Winkler tahun 1690 dan Abraham van Riebeeck tahun 1704, 1704 dan 1709. Sersan Scipio dibantu oleh Letnan Patinggi dan Letnan Tanujiwa, seorang Sunda terah atau keturunan Sumedang.

Sejak Banten berada di bawah kontrol VOC tahun 1695, juga kekuasaan Mataram atas Priangan lepas ke tangan VOC tahun 1705, wilayah bekas ibukota Pajajaran berada dalam pengawasan VOC. Di dalam memanfaatkan wilayah yang dikuasainya, VOC tentu saja perlu mengenal suatu wilayah tersebut terlebih dahulu.

Dari ekspedisi tersebut tidak ditemukannya pemukiman di bekas ibukota kerajaan, kecuali di Cikeas, Citeureup, Kedung Halang dan Parung Angsana. Pada tahun 1687 juga, Tanujiwa yang mendapat perintah dari Camphuijs untuk membuka hutan Pajajaran, akhirnya berhasil mendirikan sebuah perkampungan di Parung Angsana, yang diberi nama Kampung Baru. Tempat inilah menjadi cikal bakal tempat kelahiran Kabupaten Bogor. Kampung-kampung lain yang didirikan oleh Tanujiwa bersama anggota pasukannya adalah Parakan Panjang, Parung Kujang, Panaragan, Bantar Jati, Sempur, Baranang Siang, Parung Banteng, dan Cimahpar. Pada waktu itu Kampung Baru menjadi semacam Pusat Pemerintahan bagi kampung-kampung lainnya.

Dokumen tanggal 7 November 1701 menyebut Tanujiwa sebagai Kepala Kampung Baru dan kampung-kampung lain yang terletak di sebelah hulu Ciliwung. Tanujiwa telah ditunjuk sebagai pemimpin kaum koloni di daerah itu. Atas dasar itulah, De Haan memulai

mendaftarkan bupati Kampung Baru atau Buitenzorg dari tokoh Tanujiwa (1689-1705).

Pada tahun 1745 sembilan buah kampung digabungkan menjadi satu pemerintahan di bawah Kepala Kampung Baru yang diberi gelar Demang. Gabungan kesembilan kampung inilah yang disebut Regentschap Kampung Baru, yang kemudian menjadi Regentschap Buitenzorg. Pada tahun 1750, sewaktu masa pemerintahan Gubernur Jenderal Baron van Imhoff, dibangunlah tempat peristirahatan, lokasinya berada pada Istana Bogor sekarang yang diberi nama Buitenzorg.

Pada tahun 1754, Bupati Kampung Baru, Demang Wiranata mengajukan permohonan kepada Gubernur Jenderal Jacob Mossel agar diijinkan mendirikan rumah tempat tinggal di Sukahati, terletak di Timur Cisadane dekat Cipakancilan yang lokasinya dekat empang besar. Nama Empang selanjutnya berangsur-angsur mendesak nama Sukahati, yang akhirnya pada 1815 secara resmi nama daerahnya

adalah Empang. Dengan dibukanya jalur hubungan kereta api antara Batavia dan Buitenzorg pada tahun 1873, sangat mempengaruhi mobilitas sosial dan perekonomian kota.

Konon di sekitar wilayah Buitenzorg pada waktu itu banyak pohon enau atau *kawung*. Pohon-pohon tersebut cukup mengganggu keindahan wilayah sehingga banyak yang ditebang. Akibatnya, di wilayah tersebut banyak tunggul kawung. Masyarakat sekitarnya pada waktu itu menyebut tunggul kawung dengan sebutan “bogor” atau “pogor”. Sejak itulah, nama Buitenzorg jarang dipakai lagi karena berubah nama menjadi Bogor hingga sekarang.

## 2. Toponimi Kota Bogor



Setelah pemerintahan kembali kepada pemerintah Belanda pada tahun 1903, terbit Undang-Undang Desentralisasi yang menggantikan sistem pemerintahan tradisional dengan sistem administrasi pemerintahan modern, yang menghasilkan *Gemeente Buitenzoorg*.

Pada tahun 1925, dibentuk provinsi Jawa Barat (*provincie West Java*) yang terdiri dari 5 karesidenan, 18 kabupaten dan kotapraja (*stadsgemeente*). Buitenzoorg menjadi salah satu *stadsgemeente*.

Pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942, pemerintahan Kota Bogor menjadi lemah setelah pemerintahan dipusatkan pada tingkat karesidenan.

Pada tahun 1950, Buitenzorg menjadi Kota Besar Bogor yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 1950.

Pada tahun 1957, nama pemerintahan diubah menjadi Kota Praja Bogor, sesuai Undang-Undang nomor 1 tahun 1957.

Kota Praja Bogor berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor, dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 1965<sup>[4]</sup> dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1974.

Kotamadya Bogor berubah statusnya menjadi Kota Bogor pada tahun 1999 dengan berlakunya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999.



### 3. Toponimi Depok



Kata “dépok” dalam bahasa Sunda bermakna ‘kampung’ atau ‘bertapa’. Oleh karena itu, muncul kata padepokan yang bermakna ‘perkampungan’ atau ‘pertapaan’. Namun, apa makna Depok dalam penamaan tempat Depok, masih belum jelas.

Wilayah Depok sekarang ini pada awalnya hanyalah hamparan perkebunan dan semak-semak belantara yang bernama Kampung Bojong. Awalnya hanya sebagai tempat transit pedagang-pedagang Tionghoa yang hendak berjualan. Lama-lama menjadi pemukiman, yang disebut Pondok Cina.

Menurut cerita, awalnya Depok merupakan sebuah dusun terpencil ditengah hutan belantara dan semak belukar. Pada tanggal 18 Mei 1696 seorang pejabat tinggi eks-VOC, Cornelis Chastelein, membeli tanah yang meliputi daerah Depok serta sedikit wilayah Jakarta Selatan dan Ratujoya, Bojonggede, seharga 700 ringgit. Status tanah itu adalah tanah partikelir atau terlepas dari kekuasaan Hindia Belanda. Di sana ditempatkan budak-budak dan pengikutnya bersama penduduk asli. Tahun 1871 Pemerintahan Belanda menjadikan daerah Depok sebagai daerah yang memiliki pemerintahan sendiri (otonom), lepas dari pengaruh dan campur tangan dari luar. Daerah otonomi Chastelein ini dikenal dengan sebutan *Het Gemeente Bestuur van Het Particuliere Land Depok*. Pada zaman kemerdekaan Depok ini menjadi sebuah kecamatan yang berada di lingkungan Kewedanaan atau Pembantu Bupati wilayah Parung Kabupaten Bogor.

Sebagai daerah baru, Depok menarik minat pedagang-pedagang Tionghoa untuk berjualan di sana.

Namun Cornelis Chastelein pernah membuat peraturan bahwa orang-orang Cina tidak boleh tinggal di kota Depok. Mereka hanya boleh berdagang, tapi tidak boleh tinggal. Ini tentu menyulitkan mereka mengingat saat itu perjalanan dari Depok ke Jakarta bisa memakan waktu setengah hari. Untuk mengatasi kesulitan transportasi, pedagang-pedagang tersebut membuat tempat transit di luar wilayah Depok, yang bernama Kampung Bojong. Mereka berkumpul dan mendirikan pondok-pondok sederhana di sekitar wilayah tersebut sehingga muncul Kampung Pondok Cina.

Menurut cerita H. Abdul Rojak, sesepuh masyarakat sekitar Pondok Cina, daerah Pondok Cina dulunya bernama Kampung Bojong. “Lama-lama daerah ini disebut Kampung Pondok Cina. Sebutan ini berawal ketika orang-orang keturunan Tionghoa datang untuk berdagang ke pasar Depok. Pedagang-pedagang itu datang menjelang matahari terbenam. Karena sampainya malam hari, mereka istirahat dahulu dengan

membuat pondok-pondok sederhana. Kebetulan di daerah tersebut ada seorang tuan tanah keturunan Tionghoa. Akhirnya, mereka semua ditampung dan dibiarkan mendirikan pondok di sekitar tanah miliknya. Lalu menjelang subuh, orang-orang keturunan Tionghoa tersebut bersiap-siap untuk berangkat ke pasar Depok.”

Kampung Bojong berubah nama menjadi kampung Pondok Cina pada tahun 1918. Masyarakat sekitar daerah tersebut selalu menyebut kampung Bojong dengan sebutan Pondok Cina. Lama-kelamaan nama Kampung Bojong hilang dan timbul sebutan Pondok Cina sampai sekarang.

Konon Pondok Cina dulunya hanya berupa hutan karet dan sawah. Orang yang tinggal di daerah tersebut hanya berjumlah lima kepala keluarga, itu pun semuanya orang keturunan Tionghoa. Selain berdagang ada juga yang bekerja sebagai petani di sawah sendiri. Sebagian lagi bekerja di ladang kebun karet milik tuan tanah orang-orang Belanda. Semakin

lama, beberapa kepala keluarga itu pindah ke tempat lain. Tak diketahui pasti apa alasannya. Yang jelas, hanya sisa satu orang keluarga di sana. Hal ini dikatakan oleh Ibu Sri, yakni generasi kelima dari keluarga yang sampai kini masih tinggal di Pondok Cina.

Kota Madya Depok (dulunya kota administratif) dikenal sebagai penyangga ibukota. Para penghuni yang mendiami wilayah Depok sebagian besar berasal dari pindahan orang Jakarta. Tak heran kalau dulu muncul pomeo singkatan Depok. Daerah Elit Pemukiman Orang Kota.

#### 4. Toponimi Bekasi



Asal mula nama Bekasi terkait dengan masa pemerintahan kerajaan Tarumanagara dengan rajanya yang terkenal, Purnawarman. Kerajaan Tarumanegara meliputi daerah-daerah Banten, Sundakalapa (Jayakarta atau Jakarta), Bogor, Bekasi, sampai sebelah timur Citarum. Pada masa pemerintahannya, Purnawarman membangun saluran irigasi yang dikenal sebagai Chandrabaga membentang sejauh 11 km dan melewati daerah Bekasi sekarang ini. Saluran irigasi ini masih bisa dijumpai sekarang dalam bentuk Kali Bekasi.

Kata “chandra” dalam Chandrabhaga, berarti *sasih* atau *bulan* Bhaga. Urutan kata Chandrabhaga dibalikan menjadi *Bhagasasi*, kemudian berubah lagi menjadi *Bhagasi*, lalu berubah lagi menjadi Bekasi seperti yang diucapkan sampai sekarang ini.

Versi lain mengatakan bahwa Bekasi berasal dari kata “baghasi”, “baghasasi”, atau “baghasasih”. Kata ini pun merupakan penerjemahan dari kata *Chandrabaga*. *Chandra* artinya ‘bulan, *sasih* (bahasa Jawa kuno)’ dan *bhaga* artinya ‘bagian’. Secara harfiah *chandrabhaga* berarti ‘bagian dari bulan’.

Keterangan mengenai Chandrabhaga dapat dilihat dari petikan prasasti berikut.

*Pura rajadhirajena guruna pinabahuna khata khyatam Purimprapya chandrabagharnnavam yayau, Pravardhamana – dravincad – vatsare crigunaujasa Narendradhvayabhutena crimata purnnvwrmmna parabhya Phalgune mase khata krsna tasmitithau caitrasukla Trayosdsyam dibais siddhaikavinsakaih a yata Satrasahasrena dhanusam sasaterna cadvavinsena nadi ramya gomati nirmalodaka pitamahasya rajasser vvidarya sibiravanim brahmanair o-sahasrena prayati krtmaksina.*

‘[Dahulu sungai Candrabaga digali oleh Rajadirajaguru yang berlengan kuat (besar kekuasaannya), setelah mencapai kota yang mashur, mengalir ke laut. Dalam tahun ke-22 pemerintahannya yang makin sejahtera, panji segala raja, yang termashur Purnawarman, telah menggali saluran sungai Gomati yang indah, airnya jernih, mulai tanggal 20 bagian bulan gelap Paing dan selesai tanggal 20 bagian bulan terang Caitra, selesai dalam waktu 20 hari. Panjangnya 6122 busur (kurang lebih 11 km) mengalir ke tengah-tengah kakeknya, Sang Rajaresi. Setelah selesai dihadiahkanlah 1000 ekor sapi kepada para brahmana]’.



## F. SEJARAH TOPONIMI PANTURA

### 1. Toponimi Cirebon



Kisah asal-usul Cirebon dapat ditemukan dalam naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, yang ditulis pada tahun 1720 oleh Pangeran Aria Cirebon, Putera Sultan Kasepuhan yang pernah diangkat sebagai perantara para Bupati Priangan dengan VOC antara tahun 1706-1723.

Dalam naskah itu disebutkan bahwa asal mula kata "Cirebon" adalah "sarumban", lalu mengalami perubahan pengucapan menjadi "Caruban". Kata ini

mengalami proses perubahan lagi menjadi "Carbon", berubah menjadi kata "Cerbon", dan akhirnya menjadi kata "Cirebon". Menurut sumber ini, para wali menyebut Carbon sebagai "Pusat Jagat", negeri yang dianggap terletak di tengah-tengah Pulau Jawa. Masyarakat setempat menyebutnya "Negeri Gede". Kata ini kemudian berubah pengucapannya menjadi "Garage" dan berproses lagi menjadi "Grage".

Menurut P.S. Sulendraningrat, penanggung jawab sejarah Cirebon, munculnya istilah tersebut dikaitkan dengan pembuatan terasi yang dilakukan oleh Pangeran Cakrabumi alias Cakrabuana. Kata "Cirebon" berdasarkan kiratabasa dalam bahasa Sunda berasal dari "Ci" artinya "air" dan "rebon", yaitu "udang kecil" sebagai bahan pembuat terasi. Perkiraan ini dihubungkan dengan kenyataan bahwa dari dahulu hingga sekarang, Cirebon merupakan penghasil udang dan terasi yang berkualitas baik.

Berbagai sumber menyebutkan tentang asal-usul Sunan Gunung Jati, pendiri Kesultanan Cirebon. Dalam

sumber lokal yang tergolong historiografi, disebutkan kisah tentang Ki Gedeng Sedhang Kasih, sebagai kepala Nagari Surantaka, bawahan Kerajaan Galuh. Ki Gedeng Sedhang Kasih, adik Raja Galuh Prabu Anggalarang, memiliki puteri bernama Nyai Ambet Kasih. Puterinya ini dinikahkan dengan Raden Pamanah Rasa, Putra Prabu Anggalarang.

Karena Raden Pamanah Rasa memenangkan sayembara lalu menikahi Puteri Ki Gedeng Tapa yang bernama Nyai Subanglarang, dari Nagari Singapura, tetangga Nagari Surantaka. Dari perkawinan tersebut lahirlah tiga orang anak, yaitu Raden Walangsungsang, Nyai Lara Santang dan Raja Sangara. Setelah ibunya meninggal, Raden Walangsungsang serta Nyai Lara Santang meninggalkan Keraton, dan tinggal di rumah Pendeta Budha, Ki Gedeng Danuwarsih.

Puteri Ki Gedeng Danuwarsih yang bernama Nyai Indang Geulis dinikahi Raden Walangsungsang, serta berguru Agama Islam kepada Syekh Datuk Kahfi. Raden Walangsungsang diberi nama baru, yaitu Ki

Samadullah, dan kelak sepulang dari tanah suci diganti nama menjadi Haji Abdullah Iman. Atas anjuran gurunya, Raden Walangsungang membuka daerah baru yang diberi nama Tegal Alang-alang atau Kebon Pesisir. Daerah Tegal Alang-alang berkembang dan banyak didatangi orang Sunda, Jawa, Arab, dan Cina, sehingga disebutlah daerah ini "Caruban", artinya campuran. Bukan hanya etnis yang bercampur, tapi agama juga bercampur.

Atas saran gurunya, Raden Walangsungang pergi ke Tanah Suci bersama adiknya, Nyai Lara Santang. Di Tanah Suci inilah, adiknya dinikahi Maulana Sultan Muhammad bergelar Syarif Abdullah keturunan Bani Hasyim putera Nurul Alim. Nyai Lara Santang kemudian berganti nama menjadi Syarifah Mudaim.

Dari perkawinan ini, lahirlah Syarif Hidayatullah yang kelak menjadi Sunan Gunung Jati. Dilihat dari Genealogi, Syarif Hidayatullah yang nantinya menjadi

salahseorang Wali Sanga, menduduki generasi ke-22 dari Nabi Muhammad.

Sesudah adiknya kawin, Ki Samadullah atau Abdullah Iman pulang ke Jawa. Setibanya di tanah air, mendirikan Masjid Jalagrahan, dan membuat rumah besar yang nantinya menjadi Keraton Pakungwati. Setelah Ki Danusela meninggal, Ki Samadullah diangkat menjadu Kuwu Caruban dan digelar Pangeran Cakrabuana. Pakuwuan ini ditingkatkan menjadi Nagari Caruban larang. Pangeran Cakrabuana mendapat gelar dari ayahandanya, Prabu Siliwangi, sebagai Sri Mangana, dan dianggap sebagai cara untuk melegitimasi kekuasaan Pangeran Cakrabuana.

Setelah berguru di berbagai negara, kemudian tiba di Jawa. Dengan persetujuan Sunan Ampel dan para wali lainnya disarankan untuk menyebarkan agama Islam di Tatar Sunda. Syarif Hidayatullah pergi ke Caruban Larang dan bergabung dengan uwaknya, Pangeran Cakrabuana. Syarif Hidayatullah tiba di pelabuhan Muara Jati, terus ke Desa Sembung-

Pasambangan, dekat Amparan Jati, dan mengajar Agama Islam, menggantikan Syekh Datuk Kahfi.

Syekh Jati juga mengajar di dukuh Babadan. Di sana ia menemukan jodohnya dengan Nyai Babadan Puteri Ki Gedeng Babadan. Karena isterinya meninggal, Syekh Jati kemudian menikah lagi dengan Dewi Pakungwati Puteri Pangeran Cakrabuana, disamping menikahi Nyai Lara Bagdad, Puteri Sahabat Syekh Datuk Kahfi.

Syekh Jati kemudian pergi ke Banten untuk mengajarkan agama Islam di sana. Ternyata Bupati Kawunganten yang keturunan Pajajaran sangat tertarik, sehingga masuk Islam dan memberikan adiknya untuk diperistri. Dari perkawinan dengan Nyai Kawunganten, lahirlah Pangeran Saba Kingkin, kelak dikenal sebagai Maulana Hasanuddin pendiri Kerajaan Banten. Sementara itu, Pangeran Cakrabuana meminta Syekh Jati untuk menggantikan kedudukannya di Caruban. Kemudian dinobatkan sebagai kepala Nagari dengan gelar Susuhunan Jati atau Sunan Gunung Jati atau

Sunan Caruban. Sejak tahun 1479, Caruban Larang dikembangkan dari sebuah nagari menjadi Pusat Kesultanan dengan Cirebon.

Pada awal abad ke-16 Cirebon dikenal sebagai kota perdagangan terutama untuk komoditas beras dan hasil bumi yang diekspor ke Malaka. Seorang sejarawan Portugis, Joao de Barros dalam tulisannya yang berjudul *De Asia* bercerita tentang hal tersebut. Sumber lainnya yang memberitakan Cirebon periode awal, adalah Medez Pinto yang pergi ke Banten untuk mengapalkan lada. Pada tahun 1596, rombongan pedagang Belanda dibawah pimpinan Cornelis de Houtman mendarat di Banten. Pada tahun yang sama orang Belanda pertama yang datang ke Cirebon melaporkan bahwa Cirebon pada waktu itu merupakan kota dagang yang relatif kuat yang sekelilingnya dibenteng dengan sebuah aliran sungai.

Sejak awal berdirinya, batas wilayah Kesultanan Cirebon bermasalah. Hal ini disebabkan, pelabuhan Kerajaan Sunda, yaitu Sundakalapa berhasil ditaklukan.

Ketika Banten muncul sebagai Kesultanan yang berdaulat ditangan putra Susuhunan Jati, yaitu Maulana Hasanuddin. Masalahnya timbul, apakah pelabuhan Sunda Kalapa termasuk ke dalam kekuasaan Cirebon atau kekuasaan Banten?

Bagi Kesultanan Banten, batas wilayah ini dibuat mudah saja, dan tidak pernah menimbulkan konflik. Hanya saja pada tahun 1679 dan 1681, Cirebon pernah mengklaim daerah Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Galuh, dan kabupaten Sukapura yang saat itu dipengaruhi oleh Banten, sebagai wilayah pengaruhnya.

Pada masa Panembahan Ratu, perhatian lebih diarahkan kepada penguatan kehidupan keagamaan. Kedudukannya sebagai ulama, merupakan salah satu alasan Sultan Mataram agak segan untuk memasukkan Cirebon sebagai daerah taklukan. Wilayah Kesultanan Cirebon saat itu meliputi Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Ketika Panembahan Ratu wafat tahun 1649,



ia digantikan oleh cucunya yang bernama Panembahan Girilaya.

Dari perkawinannya dengan puteri Sunan Tegalwangi, Panembahan Girilaya memiliki 3 orang anak, yaitu Pangeran Martawijaya, Pangeran Kertawijaya, dan Pangeran Wangsakerta.

Sejak tahun 1678, dibawah perlindungan Banten, Kesultanan Cirebon terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu:

- (a) wilayah Kasepuhan, yang dikepalai oleh Pangeran Martawijaya, atau dikenal dengan sebutan Sultan Sepuh I;
- (b) wilayah Kesultanan Kanoman, yang dikepalai oleh Pangeran Kertawijaya yang dikenal dengan sebutan Sultan Anom I; dan
- (c) wilayah Panembahan yang dikepalai oleh Pangeran Wangsakerta yang dikenal dengan sebutan Panembahan Cirebon I.

## 2. Kota Cirebon



Menurut Manuskrip Purwaka Caruban Nagari, pada abad XIV di pantai Laut Jawa ada sebuah desa nelayan kecil bernama Muara Jati. Pada waktu itu sudah banyak kapal asing yang datang untuk berniaga dengan penduduk setempat. Pengurus pelabuhan adalah Ki Gedeng Alang-Alang yang ditunjuk oleh penguasa Kerajaan Galuh (Padjadjaran). Di pelabuhan ini juga terlihat aktivitas Islam semakin berkembang. Ki Gedeng Alang-Alang memindahkan tempat pemukiman

ke tempat pemukiman baru di Lemahwungkuk, 5 km arah selatan mendekati kaki bukit menuju kerajaan Galuh. Sebagai kepala pemukiman baru, maka pada waktu itu diangkatlah Ki Gedeng Alang-Alang dengan gelar Kuwu Cerbon.

Pada Perkembangan selanjutnya, Pangeran Walangsungsang, putra Prabu Siliwangi ditunjuk sebagai Adipati Cirebon dengan Gelar Cakrabumi. Pangeran inilah yang mendirikan Kerajaan Cirebon, diawali dengan tidak mengirimkan upeti kepada Raja Galuh. Oleh Raja Galuh dijawab dengan mengirimkan bala tentara ke Cirebon Untuk menundukkan Adipati Cirebon, namun ternyata Adipati Cirebon terlalu kuat bagi Raja Galuh sehingga ia keluar sebagai pemenang. Dengan demikian, berdirilah kerajaan baru di Cirebon dengan rajanya yang bergelar Raden Cakrabuana. Berdirinya kerajaan Cirebon menandai diawalinya Kerajaan Islam Cirebon dengan pelabuhan Muara Jati yang aktivitasnya berkembang sampai kawasan Asia Tenggara.

Pada abad ke-13 Kota Cirebon ditandai dengan kehidupan yang masih tradisional dan pada tahun 1479 berkembang pesat menjadi pusat penyebaran dan Kerajaan Islam terutama di wilayah Jawa Barat. Kemudian setelah penjajah Belanda masuk, dibangunlah jaringan jalan raya darat dan kereta api sehingga mempengaruhi perkembangan industri dan perdagangan.

Pada tahun 1926 Kota Cirebon disahkan menjadi *Gemeente Cheribon*. Pada tahun 1957, status pemerintahan Cirebon berubah menjadi Kota Praja, yang kemudian ditetapkan menjadi Kotamadya tahun 1965. Selanjutnya, Kotamadya Cirebon berubah lagi statusnya menjadi Kota Cirebon.